



Indonesia
For Global Justice

Mengapa keputusan keuangan global penting untuk perempuan?

PAPER FEBRUARY 2022

Selama pandemi corona, banyak perempuan di seluruh dunia telah berjuang lebih keras dari sebelumnya dalam mencari nafkah untuk bertahan hidup. Baik ekonomi formal maupun informal telah dipengaruhi oleh kebijakan lockdown, pendapatan perempuan menurun melebihi laki-laki, dan meningkatkan pekerjaan rumah tangga dan kerja perawatan mereka yang tidak dibayar. Hak-hak perempuan dan penentuan nasib sendiri telah mundur, dan kemajuan dalam kesetaraan gender telah berhenti.

Jadi bagaimana masalah keuangan sehari-hari yang dihadapi banyak perempuan terkait dengan sistem keuangan internasional, dan adakah solusinya?

Mari kita perbesar pertemuan **Group of Twenty (G20)**, dimana keputusan penting tentang keuangan global dibuat oleh sekelompok kecil menteri keuangan dan gubernur bank sentral dari negara-negara terbesar dan terkaya di dunia. Keputusan mereka yang tidak transparan, seringkali untuk kepentingan keuangan mereka sendiri, memiliki konsekuensi terhadap hak-hak perempuan, kehidupan sehari-hari mereka, dan kesetaraan gender, terutama di banyak negara berpenghasilan rendah hingga menengah di luar G20.

Penghindaran dan Pengemplangan Pajak Merugikan Perempuan

Perempuan miskin secara tidak proporsional dibandingkan dengan laki-laki, karena mereka melakukan lebih banyak pekerjaan rumah tangga dan kerja yang tidak dibayar untuk keluarga besar dan masyarakat mereka. Cara efektif untuk mengurangi dan mendistribusikan kembali pekerjaan ini adalah dengan menyediakan layanan sosial publik yang terjangkau dan fungsional, termasuk perawatan kesehatan, pembibitan, sekolah, dan sistem transportasi.

Layanan penting ini sering kali memberi perempuan peluang untuk mengakses pekerjaan formal yang dibayar. Pemerintah membutuhkan pendapatan pajak yang cukup untuk membiayai layanan ini. Namun, negara-negara di seluruh dunia sedang ditipu dengan adanya penghindaran dan penggelapan pajak oleh perusahaan multinasional (MNCs) dan individu kaya atau korup. Pada tahun 2021, para menteri keuangan G20 akhirnya mengesahkan kesepakatan untuk memajukan

Myriam Vander Stichele
Senior Researcher Somo



MNCs dengan tarif minimum yang rendah sebesar 15%. Namun, ini gagal memberikan pendapatan tambahan bagi negara-negara berkembang karena G20 setuju bahwa MNCs akan membayar pajak atas keuntungan mereka di negara asal mereka. Hal ini pada akhirnya membuat negara-negara tuan rumah berpenghasilan rendah kehilangan pendapatan penting, yang diperkirakan setara dengan jumlah yang dibutuhkan untuk setengah dari layanan perawatan kesehatan mereka.

- Tindakan berani G20 diperlukan untuk menghentikan korporasi dan individu dari penghindaran dan penggelapan pajak di negara mereka sendiri dan di seluruh dunia. Ini akan memungkinkan pembiayaan layanan publik yang mengurangi dan mendistribusikan kembali pekerjaan rumah tangga dan kerja perempuan yang tidak dibayar.

APA ITU G20?

G20 terdiri dari Uni Eropa ditambah 19 negara: Argentina, Australia, Brasil, Kanada, Cina, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, Amerika Serikat Raya, dan Amerika Serikat.

Menteri keuangan G20, gubernur bank sentral, para pejabat dan kepala negara membahas masalah keuangan global, mengawasi keputusan lembaga keuangan global lainnya, dan menyetujui langkah-langkah yang bertujuan untuk menghindari krisis keuangan.

Keringanan utang diperlukan untuk meringankan beban perempuan

Karena pendapatan yang tidak mencukupi terkait dengan penghindaran pajak dan kebijakan lockdown, banyak pemerintah yang lebih miskin meningkatkan pinjaman mereka selama pandemi. Akibatnya, sebagian besar anggaran mereka kini dikhususkan untuk membayar utang dengan tingkat bunga komersial yang tinggi.

Para menteri keuangan G20 sepakat pada 2020 dan 2021 bahwa pembayaran utang oleh negara-



negara termiskin **harus ditunda, direstrukturisasi, atau dibatalkan**. Namun, ini tidak menghasilkan **keringanan utang** yang memadai karena pemberi pinjaman komersial tidak dipaksa untuk memenuhi persyaratan ini. Selain itu, ketentuan keringanan utang G20 gagal untuk fokus mendukung kebutuhan khusus dari perempuan.

Banyak negara berpenghasilan rendah terpaksa memotong pengeluaran untuk layanan publik yang penting atau tidak mampu memberikan kompensasi kepada keluarga miskin atas hilangnya pendapatan. Hal ini menyebabkan jumlah anak perempuan dalam keluarga miskin yang tidak proporsional putus sekolah. Selain itu, perempuan yang tidak mampu menggabungkan pekerjaan berbayar dengan pekerjaan rumah tangga dan kerja tambahan yang tidak dibayar sering menghadapi spiral hutang pribadi.

- G20 harus segera mempercepat kebijakan untuk meringankan utang global, terutama utang negara miskin yang dipegang oleh negara-negara G20 atau bank komersial dan investor yang berbasis di negara-negara G20. Pembatalan utang harus secara khusus berfokus pada penguatan hak-hak perempuan serta kebutuhan dasar dan kesejahteraan warga yang lebih miskin. pekerjaan mestic dan perawatan.

'Keuangan berkelanjutan' harus mencakup hak-hak perempuan

G20 saat ini mempromosikan 'keuangan berkelanjutan', termasuk pembiayaan 'hijau' sukarela dan menguntungkan dari kegiatan ramah iklim oleh bank komersial dan investor. Namun, memastikan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan tentang inisiatif hijau ini

bukanlah prioritas, tidak juga terhadap pembayaran upah yang setara atau upaya menghindari dampak negatif pada mata pencaharian perempuan.

Misalnya, diskusi G20 seputar pembiayaan untuk 'infrastruktur berkelanjutan', termasuk jalan raya, transportasi umum dan penyediaan energi baru, mengabaikan kebutuhan khusus perempuan akan transportasi yang aman dan terjangkau, koneksi lokal dan transisi ke energi berkelanjutan.

- Diskusi G20 tentang proyek ramah iklim 'hijau' dan 'pembiayaan berkelanjutan' oleh perusahaan, bank, investor atau pemerintah harus lebih komprehensif secara lingkungan dan sosial dan mempromosikan hak dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan.

Bisakah perempuan mendapat manfaat dari investasi komersial baru?

Perempuan dan anak muda yang lebih kaya cenderung berinvestasi dalam proyek dan perusahaan yang bermanfaat secara sosial dan lingkungan. Tren yang berkembang dalam keuangan berkelanjutan ini mencakup pinjaman dan investasi yang secara khusus mendukung perempuan. Bank komersial dan investor menghargai proyek sejenis karena perempuan memiliki rekam jejak yang baik dalam menghasilkan dan membayar utang, dan pemerintah ingin merangsang pertumbuhan ekonomi dengan mendukung lebih banyak perempuan dalam angkatan kerja formal.

Investasi semacam itu dapat menguntungkan bisnis perempuan dan meningkatkan akses mereka ke layanan keuangan digital. Mereka bertujuan untuk mendorong perusahaan yang berfokus pada peningkatan partisipasi perempuan, kesetaraan upah dan keamanan.

Namun, keterlibatan dalam proses pendanaan ini oleh para ahli gender, dari PBB atau bahkan lebih baik lagi dari masyarakat sipil atau akademisi, sangat penting. Keahlian mereka diperlukan untuk mencegah investasi dan pinjaman ini dari membuat perempuan berhutang sementara kreditur komersial mendapat untung; dalam memastikan bahwa pekerjaan rumah tangga dan perawatan yang tidak dibayar tidak terus membebani perempuan; dan dalam menjaga agar

perempuan di sektor informal dan usaha kecil tidak dikesualikan.

- G20 harus mengintegrasikan kriteria dan verifikasi minimum oleh pakar gender untuk semua instrumen keuangan berkelanjutan yang dipromosikannya, setidaknya bagi mereka yang mengklaim mendukung perempuan dan hak asasi mereka.

BERTINDAK SEKARANG!

Keputusan menteri keuangan G20 memiliki dampak besar pada hak-hak perempuan, kehidupan dan penentuan nasib sendiri. Apa yang bisa kita lakukan?

- Organisasi perempuan dan kelompok masyarakat sipil harus meningkatkan kesadaran tentang bagaimana berbagai keputusan keuangan G20 berdampak negatif terhadap hak asasi perempuan, dan meminta menteri keuangan nasional mereka untuk mempromosikan isu gender di tingkat G20 dan di lembaga keuangan internasional lainnya.
- Para menteri perempuan Indonesia yang mengetuai G20 hingga Desember 2022, telah berkomitmen mendukung G20 untuk "pemberdayaan" perempuan. Janji mereka harus sangat terintegrasi dalam keputusan G20 tentang pajak, utang, 'keuangan berkelanjutan' dan reformasi keuangan lainnya.

Sumber



Centre for Research on Multinational Corporations
KNMS-iaan 17, 1019 LA Amsterdam, The Netherlands
T: +31 (0)20 639 12 91 – info@somo.nl – www.somo.nl
Cartoon: Tom van Wanrooy | The Cartoon Factory

Diterjemahkan dari :
<https://www.somo.nl/why-global-financial-decisions-matter-for-women/>

Diterjemahkan Oleh :



Sumber Foto :
<https://beritagar.id/>